

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah terdiri atas 6 (enam) tahapan yaitu tahap persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, penyusunan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir, dan penetapan. Perangkat Daerah menyusun Perubahan Renja Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diwajibkan bagi setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Perubahan Renja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan). Untuk perencanaan jangka menengah disusun dalam bentuk Renstra, dan untuk perencanaan tahunan disusun dalam bentuk Renja, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (11), yaitu “Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun”

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan keterkaitan antara Renja dengan dokumen perencanaan lainnya, dimana dalam Pasal 273 ayat (2) disebutkan “Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.” Perubahan Renja Perangkat Daerah ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan

Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Proses penyusunan rancangan Perubahan Renja Badan Pengelola Keuangan Daerah Tahun 2025 didasarkan pada Renstra Badan Pengelola Keuangan daerah 2025-2029 dengan memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan dalam Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025. Tahun 2025 merupakan tahun pertama perencanaan pembangunan Kota Padang Panjang yang berpedoman pada RPJMD 2025-2029. Dokumen Perubahan Renja Tahun 2025 disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan Daerah serta sejalan dengan tujuan RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029 yaitu Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan, aset daerah dan Pendapatan asli daerah. Penyusunan Perubahan Renja Badan Pengelola Keuangan Daerah dilakukan melalui tahapan, meliputi :

1. Persiapan penyusunan :

Meliputi pembentukan tim penyusun Perubahan Renja Perangkat daerah Tahun 2025, Pengumpulan hasil evaluasi renja 2024, pengendalian kegiatan tahun 2025.

2. Tahap perumusan rancangan awal perubahan Renja Badan Pengelola Keuangan Daerah, meliputi:

- a. Pengolahan data dan informasi ;
- b. Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah ;
- c. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan Pengelola Keuangan Daerah tahun lalu berdasarkan Renstra Badan Pengelola Keuangan Daerah;
- d. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan Daerah;
- e. Telaahan terhadap rancangan awal Perubahan RKPD;
- f. Perumusan tujuan dan sasaran;
- g. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;
- h. Perumusan kegiatan prioritas;
- i. Penyajian awal dokumen rancangan Renja Perangkat Daerah;
- j. Penyempurnaan rancangan Perangkat Daerah;
- k. Pembahasan forum Perangkat Daerah;

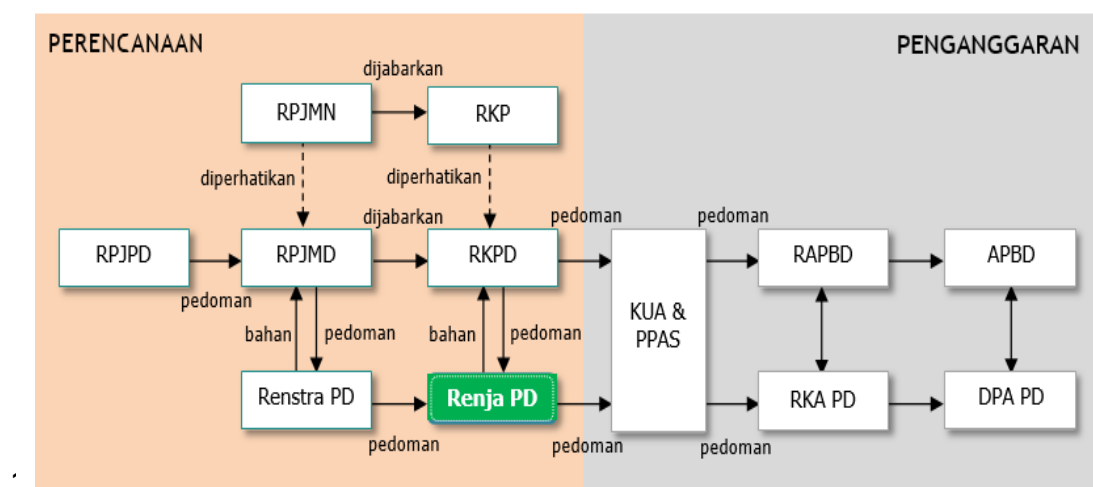
3. Penyusunan rancangan sinkronisasi dilaksanakan oleh Tim Penyusun Perubahan Renja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang

4. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;
5. Tahap penyajian rancangan Renja Perangkat Daerah, sesuai dengan sistematika yang telah ditetapkan dalam bentuk rancangan akhir;
6. Tahap Penetapan Renja Perangkat Daerah;

```

graph LR
    A[PERSIAPAN PENYUSUNAN] --> B[RANCANGAN]
    B --> C[RANCANGANN]
    C --> D[FORUM PD/LINTAS]
    D --> E[RANCANGAN]
    E --> F[PENETAP]
  
```

Gambar 1.2
Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD



Perubahan Renja BPKD Kota Padang Panjang Tahun 2025 | 3

Padang Panjang Tahun 2025 berlandaskan pada Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
5. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2024 tentang Kota Padang Panjang di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6975);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1114);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 288);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 1419);
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 Nomor 19);
13. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2009 Nomor 11 Seri E.6);
14. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
15. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang;
16. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2023 Nomor 6);
17. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024 Nomor 9)
18. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 10 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Renja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam

penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan Perubahan Tahun 2025 dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran secara berkesinambungan.

Adapun tujuan penyusunan Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Padang Panjang adalah:

- a) Menjabarkan Tujuan, Sasaran, program dan Kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Padang Panjang;
- b) Memberikan arahan dan panduan bagi peningkatan sumber-sumber pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah dalam waktu 1 Tahun ;
- c) Memberikan dasar penilaian kinerja penyelenggaraan tugas Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam kurun waktu satu tahun;
- d) Sebagai Dasar penyusunan program dan kegiatan dalam KUA PPAS Perubahan tahun 2025;
- e) Menetapkan kegiatan prioritas berdasarkan isu dan masalah yang mendesak agar lebih terarah.

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Renja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Memuat tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

Bab II Hasil Evaluasi Renja Badan Pengelola Keuangan Tahun Berkenaan

Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun berkenaan sampai dengan Triwulan I dengan menjelaskan penyebab program/kegiatan/subkegiatan yang tidak mencapai target dan melebihi target serta faktor penghambat dan faktor pendorong, evaluasi terhadap hasil Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang Triwulan I Tahun Anggaran 2025

Bab III Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah

Memuat tentang telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja PD, serta Program dan kegiatan.

Bab IV Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah

Memuat Rencana Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan Sebelum dan Sesudah Perubahan Tahun 2025

Bab V Penutup

Memuat tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH TAHUN BERKENAAN

2.1. Evaluasi Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Tahun 2025 s/d Triwulan I

Kualitas Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan. Dalam melakukan penyusunan Perubahan Renja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025 perlu diperhatikan evaluasi terhadap proyeksi capaian Renja untuk tahun berjalan yaitu Tahun 2025 sampai dengan triwulan I. Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi capaian akhir Renja Badan Pengelola Keuangan Daerah sampai dengan tahun berjalan yaitu Tahun 2025 terhadap target kinerja Tahun 2025. Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja serta mengidentifikasi sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan juga hambatan / permasalahan yang dihadapi.

Secara umum, pelaksanaan Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025, dapat terlaksana sesuai dengan target rencana yang telah ditetapkan, dengan rata-rata realisasi fisik telah mencapai 100%. Secara lebih terperinci hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 2.1

Tabel 2.1 EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG

TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2025

No	Sasaran	Program dan Kegiatan Baru	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan		Realisasi Kinerja Per triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang di Evaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025		Target Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Penanggung jawab
										I		II		III		IV								
										Kinerja	KEUANGAN	K	KEUANGAN	K	KEUANGAN	K	KEUANGAN							
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14=13/5x100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					33.895.114.104		10.221.768.772		11.487.167.033		1.961.804.162		0,00		0		0		1.961.804.162		12.183.572.934			
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Penyusunan Produk anggaran yang tertib efisien dan tepat waktu	Tepat Waktu	8.487.000.000		1.505.157.043		1.891.608.300	-	108.783.750		0		0		0	-	108.783.750		1.613.940.973		19,02	
		Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Penyusunan APBD APBDP berdasarkan ketentuan baik secara tanggal/waktu maupun ketentuan lainnya	Tepat Waktu	2.160.000.000		681.827.650		716.323.500		104.663.550		0		0		0		104.663.550		786.491.200		36,41	
		Koordinasi dan penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	18 Dokumen	1.050.000.000	6 dokumen	349.239.750	6 Dokumen	349.154.500	-	104.663.550		-	-	0		-	-	104.663.550	6 dokumen	453.903.300	33,33	43,23	

		Koordinasi dan penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran perubahan APBD	12 dokumen	390.000.000	4 dokumen	119.913.950	4 dokumen	129.015.200	-	-	-	0	-	-	0	4 dokumen	119.913.950	33,33	30,75	
		Koordinasi dan penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	6 dokumen	360.000.000	2 dokumen	106.609.650	2 dokumen	118.290.400	-	-	-	0	-	-	0	2 dokumen	106.609.650	33,33	29,61	
		Koordinasi dan penyusunan perubahan KUA dan perubahan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	6 dokumen	360.000.000	2 dokumen	106.064.300	2 dokumen	119.863.400	-	-	-	0	-	-	0	2 dokumen	106.064.300	33,33	29,46	
		Kegiatan koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah	Penyusunan Laporan Keuangan Daerah yang tepat waktu sesuai dan SAP	Tepat Waktu	202.000.000		41.824.200		113.454.800		3.826.200	0	0	0		3.826.200		45.650.400		22,60	
		Koordinasi pelaksanaan akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	12 laporan	23.000.000	8 laporan	6.642.250	8 laporan	6.553.400	2 laporan	-	-	-	-	2 laporan	0	10 laporan	6.642.250	83,33	28,88	
		Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	21 laporan	107.000.000	7 laporan	27.279.050	7 laporan	93.104.400	7 laporan	3.826.200	-	-	-	-	7 laporan	3.826.200	31.105.250	66,67	29,07	
		Koordinasi dan penyusunan ranperda tentang pertanggungjawaan pelaksanaan APBD Provinsi dan Ranper Kepala Daerah tentang penjabaran pertanggungjawaan pelaksanaan APBD Kab/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaan Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaan Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	6 dokumen	72.000.000	2 dokumen	7.902.900	2 dokumen	13.797.000	-	-	-	-	-	-	0	2 dokumen	7.902.900	33,33	10,98	

		Kegiatan Koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah	Realisasi pencairan anggaran tepat waktu sesuai RAK	83%	125.000.000		12.500.000		61.830.000		294.000		0		0		0		294.000		12.794.000		10,24	
		Rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	6 dokumen	14.000.000	6 dokumen	12.500.000	6 dokumen	61.830.000	1 dokumen	294.000	-	-	-	1 dokumen	294.000	7 dokumen	12.794.000	100,00	91,39				
							-	-	-	-	-	-	-	-	-									
		Kegiatan penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah	Jumlah dokumen perwako tentang sistem dan prosedur penatausahaan keuangan daerah		6.000.000.000		769.005.193		1.000.000.000	-	0	0	0	0	-	0		769.005.193		12,82				
		Pengelolaan dana darurat dan mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	3 Laporan	6.000.000.000	1 Laporan	769.005.193	1 Laporan	1.000.000.000	-	-	-	-	-	-	0	1 laporan	769.005.193	33,33	12,82				
		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan Pajak daerah dan Retribusi daerah	2%	1.050.178.476		253.401.790		600.578.100		38.614.200	0	0	0	0	38.614.200		292.015.990		27,81				
		Kegiatan Pencapaian Pendapatan Daerah dari Pajak Daerah	Jumlah Pencapaian Pendapatan Daerah dari Pajak Daerah	9,9 Miliar	1.050.178.476		253.401.790		600.578.100		38.614.200	0	0	0	0	38.614.200		292.015.990		27,81				

		Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disevaluasi NJOP nya	42000 objek pajak	300.000.000	400 objek pajak	96.289.650	400 objek pajak	89.261.900	-	37.561.400	-	-	0	-	-	37.561.400	400 objek pajak	133.851.050	0,95	44,62	
		Pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah	Jumlah Laporan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak Daerah	6 laporan	130.000.000	2 laporan	30.204.600	2 laporan	240.970.000	-	-	-	-	-	-	-	0	2 laporan	30.204.600	33,33	23,23	
		Analisa dan pengembangan pajak daerah serta penyusunan kebijakan pajak daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	27 dokumen	350.000.000	9 dokumen	88.428.550	9 dokumen	168.639.300	3 dokumen	1.052.800	-	-	-	-	3 dokumen	1.052.800	12 dokumen	89.481.350	44,44	25,57	
		Pengendalian pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	216 dokumen	270.178.476	72 dokumen	38.478.990	72 dokumen	101.706.900	18 dokumen	-	-	-	-	-	18 dokumen	0	90 dokumen	38.478.990	41,67	14,24	
		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Penyajian Laporan Barang Milik Daerah secara akurat dan tepat waktu	Tepat Waktu	3.905.000.000		112.823.300		471.337.800		9.914.100		0	0	0		9.914.100		122.737.400		3,14	
		Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase ketepatan waktu pelaporan penyajian data BMD tepat waktu	100%	3.905.000.000		112.823.300		471.337.800		9.914.100		0	0	0		9.914.100		122.737.400		3,14	
		Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	6 laporan	136.000.000	2 laporan	8.961.350	2 laporan	112.107.000	1 laporan	-	-	-	0	-	1 laporan	0	3 laporan	8.961.350	50,00	6,59	
		Optimalisasi penggunaan pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan barang	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	12 Dokumen	660.000.000	4 Dokumen	7.690.700	4 Dokumen	203.843.000	-	1.606.500	-	-	0	-	-	1.606.500	4 dokumen	9.297.200	33,33	1,41	

		Rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	6 Laporan	19.000.000	2 Laporan	4.781.700	2 Laporan	17.279.800	1 laporan	4.908.750	-	0	-	-	1 laporan	4.908.750	3 laporan	9.690.450	50,00	51,00	
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	6 dokumen	45.000.000	2 dokumen	8.752.550	2 dokumen	16.635.000	-	3.398.850	-	-	-	-	-	3.398.850	2 dokumen	12.151.400	33,33	27,00	
		Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	6 dokumen	45.000.000	2 dokumen	6.591.850	2 dokumen	27.803.000	1 dokumen	-	-	-	-	-	1 dokumen	0	3 dokumen	6.591.850	50,00	14,65	
		Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	9 laporan	3.000.000.000	1 laporan	76.045.150,00	1 laporan	93.670.000	-	0,00	-	-	-	-	-	0	-	76.045.150	11,11	2,53	
		Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Badan Pengelola Keuangan Daerah	100%	20.452.935.628		8.350.386.639		8.523.642.833		1.528.804.144	0	0	0	0		1.804.492.112		8.701.134.206			
		Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah	Persentase Pemenuhan Layanan administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	16.009.380.738		6.546.330.062		6.790.845.581		1.528.804.144	0	0	0	0		1.524.804.144		8.701.134.206			
		Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2058 org/bln	16.009.380.738	630 org/bln	6.546.330.062	630 org/bln	6.790.845.581	180 org/bln	1.524.804.144	0	0	0	0	180 org/bln	1.524.804.144	810 org/bln	8.071.134.206	39,36	50,42	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan layanan administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	100%	75.000.000		22.500.000		0		0	-	0	-	-		0		0		0,00	
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	98 paket	75.000.000	45 paket	22.500.000	-	0	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	0,00	0,00	
		Kegiatan administrasi umum perangkat daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah	90%	1.423.488.090		712.189.297		509.008.552		78.059.990	0	0	0	0		78.059.990		790.249.287		55,51	

		Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	135 paket	210.000.000	45 paket	117.696.018	45 paket	145.156.552	45 paket	25.908.800		-	0	-	45 paket	25.908.800	90 paket	143.604.818	66,67	68,38	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	24 paket	139.468.090	8 paket	17.796.100	8 paket	23.728.000	2 paket	3.200.000		-	0	-	2 paket	3.200.000	10 paket	20.996.100	41,67	15,05	
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	21 paket	24.000.000	7 paket	9.317.000	7 paket	15.488.000	7 paket	1.543.000		-	0	-	7 paket	1.543.000	14 paket	10.860.000	66,67	45,25	
		Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1386 laporan	1.050.000.000	512 laporan	567.380.179	512 laporan	324.636.000	40 laporan	47.408.190		-	0	-	40 laporan	47.408.190	552 laporan	614.788.369	39,83	58,55	
		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan BMD yang Tuntas Dilaksanakan	100%	150.000.000		175.340.000		152.713.100		0	0	0	0	0		0		175.340.000		116,89	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 unit	150.000.000	26 unit	175.340.000	26 unit	62.713.100	-	0	0	0	0	0	-	0	26 unit	175.340.000	173,33	116,89	
		Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	1 unit	90.000.000			1 unit	90.000.000	-	0	0	0	0	0		0		-		0,00	
		Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan Daerah	persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100%	1.982.992.000		645.014.331		692.445.400		149.917.828	0	0	0	0		149.917.828		794.932.159		40,09	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9 laporan	18.600.000	3 laporan	2.750.000	3 laporan	4.379.000	3 laporan	1.000.000		-	0	0	3 laporan	1.000.000	6 laporan	3.750.000	66,67	20,16	
		Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	180 laporan	489.000.000	60 laporan	130.207.273	60 laporan	163.000.000	15 laporan	28.848.544		-	0	0	15 laporan	28.848.544	75 laporan	159.055.817	41,67	32,53	
		Penyediaan Jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	6 laporan	1.475.392.000	2 laporan	512.057.058	2 laporan	525.066.400	2 laporan	120.069.284		-	-	0	2 laporan	120.069.284	4 laporan	632.126.342	66,67	42,84	

			Kantor yang Disediakan																					
		Kegiatan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah daerah	Persentase ketersediaan barang milik daerah berkategori baik	88%	887.074.800		249.012.949		378.630.200		51.710.150		0		0		0		51.710.150		300.723.099		33,90	
		Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau jabatan kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	99 Unit	617.074.800	33 Unit	198.948.449	33 Unit	242.629.000	11 unit	45.552.150		0		0		0	11 unit	45.552.150	44 unit	244.500.599	44,44	39,62	
		Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	168 unit	120.000.000	30 unit	9.000.000	56 unit	43.490.000	7 unit	3.650.000		0		0		0	7 unit	3.650.000	37 unit	12.650.000	22,02	10,54	
		Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 unit	150.000.000	1 unit	41.064.500	1 unit	92.511.200	1 unit	2.508.000		-		0,00		0,00	1 unit	2.508.000	2 unit	43.572.500	50,00	29,05	

Berdasarkan Tabel 2.1 Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang dapat di ambil Kesimpulan bahwasannya pada Tahun 2024 ada 1 Sub Kegiatan yang di hilangkan Pada Perubahan Renja Badan Pengelola Keuangan Daerah Tahun 2024 yaitu Sub Kegiatan Penyusunan Petunjuk Teknis administrasi keuangan karena sub kegiatan ini sudah tercapai 100% pada akhir Tahun anggaran 2023 sehingga tidak dilaksanakan lagi pada tahun 2024 dimana APBD 2024 sementara seluruh sub kegiatan yang lain terlaksana 100% secara kinerja. Jika kita bandingkan dengan Sub Kegiatan yang ada pada Tahun 2024 dengan Tahun 2025 ada 1 Sub Kegiatan yang tidak kita anggarakan lagi pada Tahun 2025 yaitu Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya sementara keadaan sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 seluruh sub kegiatan yang telah di targetkan tercapai 100% secara kinerja walaupun secara keuangan banyak yang tidak tercapai jika disandingkan dengan kondisi di awal Tahun hal ini disebabkan oleh Refocusing anggaran yang di lakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang sesuai dengan Inpres Nomor 5 Tahun 2025 terkait efisiensi anggaran

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pengelola Keuangan Daerah

Penyelenggaraan tugas Badan Pengelola Keuangan Daerah adalah melaksanakan fungsi sebagai Lembaga Teknis Penunjang Keuangan di Kota Padang Panjang, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang.

Dalam melakukan analisis terhadap kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang, mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025 - 2029. Analisis ini salah satunya dilakukan terhadap target dan realisasi indikator Tujuan dan Sasaran, target evaluasi capaian kinerja sasaran . Disamping itu juga dilakukan pengukuran terhadap capaian indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Indikator Kinerja Kunci yang sudah ditetapkan dalam RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023 sebagaimana disajikan pada tabel :

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengelola Keuangan Daerah

Kota Padang Panjang

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-						
					2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
1	Opini Atas Laporan Keuangan Pemerintah daerah				WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP				
2	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah				70	70,5	71	71,5	72	70	62	63,2				
3	Budget execution : Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD		IKK		9102	8,938	2,52	2,56	2,58	9102	8,938	2,52				
4	Revenue mobilization : Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD		IKK		71414	10,084	13,9	14,1	14,2	71414	10,084	13,9				
5	Manajemen aset		IKK		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
6	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya		IKK		11,791	1,06	21,15%	22,15	22,15	11,791	1,06	22,87				
7	Rasio PAD Terhadap Pendapatan Daerah		IKK		15,92	20,26	18%	18,5%	19%	15,92	20,26	18,22				
8	Rasio belanja urusan pemerintahan umum (dikurangi transfer expenditures (%))		IKK		11791	1,08	7,77	10	10	11791	1,08	7,77				

Adapun hasil analisis dari pencapaian kinerja pelayanan Badan Pengelola keuangan Daerah Tahun Tahun 2024 tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yaitu dengan hasil penilaian dengan penghargaan tertinggi atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dengan Penghargaan WTP berhasil di raih Pemerintah Kota Padang Panjang dalam 7 Tahun ber turut turut, dengan demikian artinya seluruh indikator yang menjadi penilaian atas Prestasi tersebut terlaksana dengan baik sesuai ketentuan dan aturan Perundang – undangan yang berlaku
2. Indikator Kinerja terkait Indeks Pengelola Keuangan Daerah Penilaiannya di keluarkan oleh Kemendagri pada akhir Tahun 2024 hal ini menjadi pekerjaan yang serius bagi kita bersama karena tahun lalu kita hanya memperoleh skor sebesar 63,2 sementara untuk tahun 2025 ini kita menargetkan Skor Penilaian sebesar 71,5
3. Beberapa indikator Kinerja yang ada pada Badan Pengelola Keuangan Daerah dan Juga Indikator Kinerja Kunci ada beberapa point yang tidak mencapai target yaitu
 - a. Nilai Indeks Pengelola Keuangan Daerah kita masih di bawah target yang ditetapkan hal ini disebabkan oleh yang menjadi kendala pada Tahun 2024 adalah dimana dari 6 dimensi yang menjadi penilaian terhadap Skor Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah ada 3 dimensi yang nilai kita dibawah standar yang ditetapkan, salah satunya yaitu dimensi 1 (Dimensi kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran) dimana point yang jadi penilaiannya adalah Nomenklatur dengan penganggaran dimana yang menjadi point penilaiannya kesesuaian nomenklatur dan penganggaran dari RPJMD sampai menjadi APBD, pada Tahun 2024 untuk Tujuan Sasaran, program hingga Sub kegiatannya sesuai tetapi untuk Penganggarnya hampir seluruh nya berbeda per tahapan mulai dari RPJMD, renstra, RKPD, KUA hingga menjadi APBD
 - b. Pada Indikator Kinerja Kunci yaitu Rasio PAD tidak mencapai target yang ditetapkan hal ini disebabkan oleh beberapa hal yaitu bencana tanah longsor yang terjadi pada Tahun 2024 sehingga menyebabkan kunjungan tamu yang datang ke Padang Panjang menurun drastis sehingga berdampak langsung terhadap Pajak Restaurant, Hotel dan Pajak Hiburan

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan Daerah

Isu-isu strategis pembangunan merupakan sejumlah tantangan nyata pembangunan, yang eksistensinya memberikan potret tentang perbedaan antara kondisi saat ini dengan cita-cita yang ingin dicapai sesuai pernyataan visi.

Isu-isu strategis pembangunan tersebut harus diintervensi secara baik melalui strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah di bidang perencanaan, dalam upaya pencapaian visi dan misi BPKD maupun Visi dan Misi pembangunan daerah

Penentuan isu-isu strategis dalam penyusunan Renstra menggunakan metode analisis SWOT. Analisis ini memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman. Untuk itu BPKD sebagai instansi pengelola keuangan daerah perlu mengetahui kondisi-kondisi elemen internal yang sifatnya Controllable (dapat dikuasai) yang berguna untuk mengetahui faktor kekuatan dan kelemahan serta mengenal kondisi-kondisi elemen external yang sifatnya uncontrollable (yang relatif kurang dikuasai) yang berguna untuk mengetahui faktor peluang dan ancaman dengan menggunakan pendekatan analisis

Analisis Lingkungan Internal dan Eksternal, sebagai berikut :

Dalam Pengelolaan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah satu (satu) tahun sebelumnya yaitu tahun 2024, maka harus di perhatikan faktor internal seperti kelemahan, kekuatan, peluang dan ancaman guna menentukan langkah-langkah kedepan.

Tabel. 2.3

KELEMAHAN, KEKUATAN, PELUANG DAN ANCAMAN

KELEMAHAN	KEKUATAN
(1) Kurangnya peremajaan SDM yang berkualitas sesuai dengan spesifikasi teknis pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah.	(1) Tersedianya Perda, Perwal dan Keputusan Gubernur tentang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah

(2) Reward dan Punishment belum disesuaikan dengan kondisi yang sebenarnya berdasarkan ukuran kinerja. (3) Jarang mengikuti diklat fungsional perpajakan, pengelolaan keuangan dan Aset Daerah (4) Sarana dan prasarana belum sesuai dengan standar pelayanan minimal yang telah ditentukan.	(2) Pengalaman empirik dari Sumberdaya Manusia dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah. (3) Tersedianya dana yang cukup untuk melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan daerah. (4) Kesiapan SDM dalam melaksanakan tugas tidak terbatas oleh jam kerja yang ditetapkan dalam peraturan Walikota Sikap tenggang rasa dari sesama aparat cukup tinggi.
Peluang	Ancaman
(1) Laju pertumbuhan Ekonomi selama beberapa tahun lalu menunjukan angka positif dan progresif. (2) Potensi Wajib Pajak dan Retribusi mengalami tren kenaikan yang positif. (3) Pusat Kegiatan Wilayah menjadi daya magnet terhadap hak dan kewajiban daerah	(1) Fluktuasi ekonomi makro semakin tidak jelas yang berdampak pada ekonomi mikro (2) Ketidaksabaran masyarakat dalam menghadapi globalisasi (3) Kebebasan dalam mengakses informasi keuangan melalui dunia maya. (4) Perubahan aturan yang cepat mendorong penatausahaan keuangan tidak sesuai dengan kondisi yang ada (5) Pekerjaan bertumpuk dalam waktu bersamaan

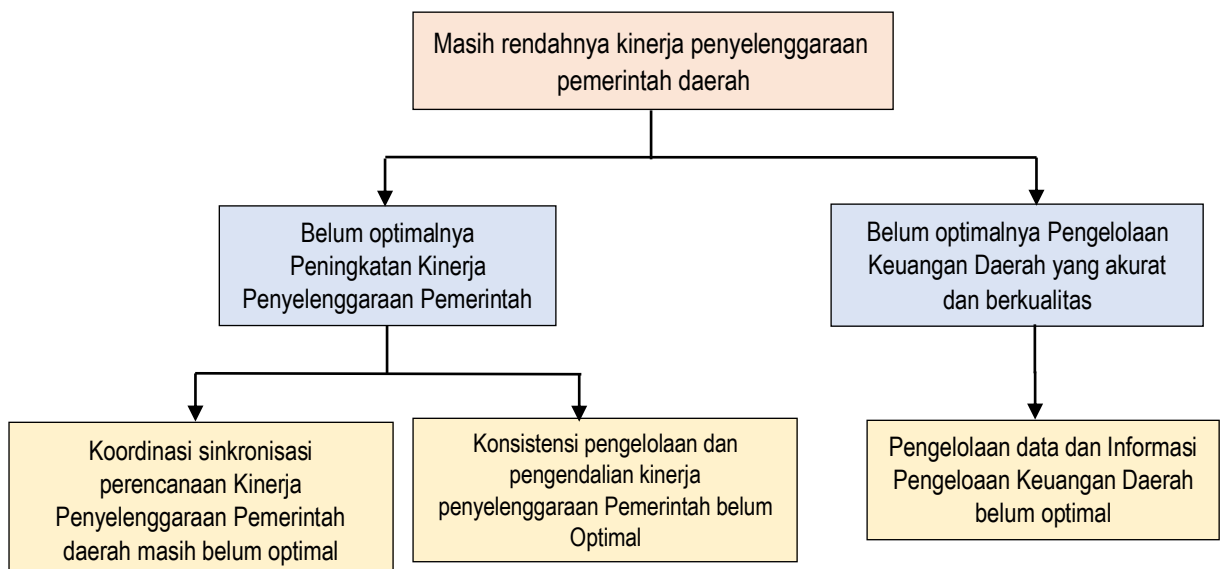
Jika kita lihat pada akar permasalahan sehingga belum terlaksananya tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan Daerah secara optimal dikarenakan adanya beberapa permasalahan dan hambatan, antara lain

Tabel 2.4
Pemetaan Permasalahan Badan Pengelola Keuangan Daerah
Kota Padang Panjang

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Ket.
1.	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang keuangan daerah belum optimall	Laporan-Laporan yang berkaitan dengan bobot penilaian Kinerja Pemerintah Daerah	Koordinasi antar OPD terkait 6 dimensi yang menjadi point dalam Penilaian Indeks Pengelola Keuangan Daerah yang belum berjalan dengan baik	
2.	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang akurat dan berkualitas	Perubahan Aturan terkait Laporan Keuangan Pemerintah Daerah harus sesuai dengan Peraturan maupun ketentuan Perundang – undangan yang berlaku	Mensosialisasikan kepada seluruh OPD terkait dengan perubahan-perubahan aturan terkait laporan Keuangan	
			Batasan waktu penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	

Sumber : BPKD Kota Padang Panjang

Gambar 2.1
POHON MASALAH
BPKD KOTA PADANG PANJANG



Berdasarkan analisis dan Penjabaran akar permasalahan di atas, maka isu-isu strategis yang perlu mendapat perhatian dan penanganan serius dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPKD 3 (tiga) tahun ke depan khususnya yang menjadi perhatian pada Perubahan Renja 2025 ini adalah :

1. Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang keuangan daerah

Didalam Pelaksanaan Peningkatan Peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah dengan meningkatkan kinerja di bidang Pemerintah Daerah baik itu berupa Laporan-laporan yang berkaitan dengan bobot penilaian kinerja penyelenggaraan Pemerintah daerah , Peningkatan Pendapatan asli Daerah dan juga dalam hal penganggaran

2. Peningkatan dan Pengembangan pengelolaan PAD

Di dalam Peningkatan dan pengembangan Pengelolaan PAD yang menjadi permasalahan yang harus ditindak lanjuti adalah objek/ Wajib Pajak yang tidak mau membayar Pajak atau menyetorkan Pajak sesuai dengan nominal seutuhnya, karena jika hal ini tidak di tindak lanjuti secara serius akan mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah

Jika Kita lihat pada Isu strategis pembangunan Kota Padang Panjang untuk penentuan kebijakan perencanaan pembangunan sebagaimana yang dilampirkan pada tabel berikut:

Tabel 2.5
Isu-isu Strategis Pembangunan Kota Padang Panjang Tahun 2025 - 2029

No	Isu Utama	Isu Strategis
1	Isu Pembangunan Manusia	a. Peningkatan kualitas pendidikan masyarakat b. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat c. kesenjangan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat yang dialami perempuan dalam merasakan manfaat pembangunan d. Peningkatan daya saing kepemudaan dan prestasi keolahragaan
2	Isu Tata Kelola Pemerintahan	a. implementasi 8 area perubahan Reformasi Birokrasi

3	Isu Pembangunan Ekonomi	a. Peningkatan pertumbuhan sektor unggulan daerah b. Masih rendahnya nilai Investasi c. Penurunan angka kemiskinan dan pengangguran d. rendahnya pendapatan masyarakat
4	Isu Tatahan Kehidupan Masyarakat	a. Mulai lunturnya nilai-nilai Adat dan Budaya di tengah masyarakat b. Masih terbatas pemahaman masyarakat dalam pengamalan nilai-nilai keagamaan c. Belum optimalnya layanan ketentraman dan ketertiban umum d. penyelenggaraan layanan kesejahteraan sosial
5	Isu kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup	a. layanan infrastruktur dasar b. kesesuaian pemanfaatan ruang c. kualitas air, udara, tutupan lahan

Sumber: Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026

2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD

Perubahan Renja Badan Pengelola Keuangan Daerah disusun dengan mengacu pada rancangan awal Perubahan RKPD. Mengingat keterbatasan kapasitas keuangan berdasarkan perhitungan proyeksi kondisi keuangan Kota Padang Panjang pada rancangan Perubahan RKPD, maka ada beberapa program dan kegiatan pada Perubahan Renja Badan Pengelola Keuangan Daerah dijadikan program dan kegiatan prioritas kedua. Untuk lebih jelasnya review terhadap rancangan awal Perubahan RKPD Tahun 2025 Kota Padang Panjang dapat dijelaskan melalui Tabel 2.6.

Tabel 2.6
Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025
Dengan Renja Perubahan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025

No	Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan (sesuaikan dengan PI)					SELISH	Catatan
	(Renstra 2024-2026)											
	Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi Pelaksanaan Kegiatan	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi Pelaksanaan	Target capaian	Kebutuhan Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13=11-6	12
	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH									12.055.2	568.104.32	
					11.487.167.033					71.358	5	
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				11.487.167.033					12.055.2	568.104.32	
										71.358	5	
	Keuangan				11.487.167.033					12.055.2	568.104.32	
										71.358	5	

X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Padang Pangjang	Persentase pemenuhan urusan penunjang pada Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah	100,00%	8.523.642.83 3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Padang Pangjang	Persentase pemenuhan urusan penunjang pada Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah	100,00%	8.129.30 1.859	2.471.159. 196		
X.XX.01.2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Padang Pangjang	Persentase pemenuhan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	100%	6.790.845.58 1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi keuangan perangkat daerah		100 Persen	6.911.92 4.813	121.079.23 2		
X.XX.01.2.02 .0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Padang Pangjang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	630 Orang/bulan	6.790.845.58 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Padang Pangjang	630 Orang/bulan	6.911.92 4.813	121.079.23 2		

X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Padang Panjang	Persentase pemenuhan layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%	509.008.552	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah		91 Persen	259.937.846	- 249.070.706		
X.XX.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Padang Panjang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket	15.488.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Padang Panjang	7 Paket	8.813.400	-6.674.600		
X.XX.01.2.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Padang Panjang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	45 Paket	145.156.552	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor	Kota Padang Panjang	45 Paket	73.835.746	- 71.320.806		

							yang Disediakan						
X.XX.01.2.06 .0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Padang Panjang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	23.728.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Padang Panjang	2 Paket	15.653.7 00	-8.074.300		
X.XX.01.2.06 .0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	462 Laporan	324.636.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Padang Panjang	256 Laporan	161.635. 000	- 163.001.00 0		

X.XX.01.2.0 6.0005	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Padang Panjang	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	100%	152.713.100	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan		100 Persen	100.000.000	- 52.713.100		
X.XX.01.2.06 .0009	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Padang Panjang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit	62.713.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Padang Panjang	7 Unit	10.000.000	- 52.713.000		
X.XX.01.2.06 .0009	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Padang Panjang	Jumlah unit kendaraan dinas yang disediakan	1 Unit	90.000.000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas yang disediakan	Kota Padang Panjang	1 Unit	90.000.000	0		

X.XX.01.2.07	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Padang Panjang	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100%	692.445.400	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi		100 Persen	645.494.000	- 46.951.400		
X.XX.01.2.07.0002	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3 Laporan	4.379.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Padang Panjang	3 Laporan	3.603.700	-775.300		
X.XX.01.2.07.0005	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 laporan	163.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Padang Panjang	60 Laporan	133.989.500	- 29.010.500		

							yang Disediakan						
X.XX.01.2.07 .0006	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	525.066.400	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Padang Panjang	2 Laporan	507.900. 800	- 17.165.600		
X.XX.01.2.0 8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Padang Panjang	Persentase ketersediaan barang milik daerah berkondisi baik	100%	378.630.200	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersedia an barang milik daerah berkondisi baik		90 Persen	211.945. 200	- 166.685.00 0		

X.XX.01.2.08 .0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Padang Panjang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	33 Unit	242.629.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Padang Panjang	23 Unit	136.540.000	242.629.000		
X.XX.01.2.08 .0002	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Padang Panjang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	56 Unit	43.490.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Padang Panjang	56 Unit	40.770.000	-2.720.000		
X.XX.01.2.08 .0004	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Padang Panjang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	1 Unit	92.511.200	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Padang Panjang	1 Unit	34.635.200	-57.876.000		

			Dipelihara/Dir ehabilitasi				yang Dipelihara/ Direhabilita si						
X.XX.01.2.0 9	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Kota Padang Panjang	Penyusunan Produk anggaran yang tertib efisien dan tepat waktu	Tepat Waktu	1.891.608.30 0	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Penyusuna n Produk anggaran yang tertib efisien dan tepat waktu		Tepat Waktu	2.829.47 3.500	937.865.20 0,00		
			Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan keuangan	Tepat Waktu			Ketepatan Waktu Penyampai an laporan Keuangan		Tepat Waktu				
X.XX.01.2.0 9	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Kota Padang Panjang	Penyusunan APBD/ APBDP berdasarkan ketentuan baik secara tanggal/ waktu	Tepat Waktu	716.323.500	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Penyusuna n APBD APBDP berdasarka n ketentuan baik secara		Tepat Waktu	684.284. 600	- 32.038.900		

			maupun ketentuan lainnya				tanggal/ waktu maupun ketentuan lainnya						
X.XX.01.2.09 .0011	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Kota Padang Panjang	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	118.290.400	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Kota Padang Panjang	2 Dokume n	115.739. 400	-2.551.000		
5.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Kota Padang Panjang	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	119.863.400	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Kota Padang Panjang	2 Dokume n	116.192. 400	-3.671.000		

5.01.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Kota Padang Panjang	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	6 dokumen	349.154.500	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Kota Padang Panjang	6 Dokumen	333.618.400	- 15.536.100		
5.01.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Kota Padang Panjang	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	4 Dokumen	129.015.200	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran	Kota Padang Panjang	4 Dokumen	118.734.400	- 10.280.800		

							Perubahan APBD							
5.01.02.2.01.0005	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Kota Padang Panjang	Realisasi pencairan anggaran tepat waktu sesuai RAK	88%	61.830.000	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Kota Padang Panjang	Realisasi pencairan anggaran tepat waktu sesuai RAK	88%	11.872.000	- 49.958.000			
5.01.02.2.01.0002	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Kota Padang Panjang	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	6 Dokumen	61.830.000	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Kota Padang Panjang	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	6 Dokumen	11.872.000	- 49.958.000			

5.01.02.2.02 .0001	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Tepat Waktu	113.454.800	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Tepat Waktu	33.316.900	- 80.137.900		
5.01.02.2.03	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	4 Laporan	6.553.400	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	8 Laporan	3.196.000	-3.357.400		

5.01.02.2.03 .0003	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	7 Laporan	93.104.400	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolida si	7 Laporan	24.157.9 00	- 68.946.500		
-----------------------	--	---------------------------	---	-----------	------------	---	---------------------------	---	--------------	----------------	-----------------	--	--

5.01.02.2.04	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaba n Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaba n Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Kota Padang Panjang	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungja waban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Ko ta dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungja waban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Ko ta	2 Dokumen	13.797.000	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawa ban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawa ban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Kota Padang Panjang	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota	2 Dokume n	5.963.00 0	-7.834.000		
--------------	---	---------------------------	---	--------------	------------	---	---------------------------	--	------------------	---------------	------------	--	--

5.01.03	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Kota Padang Panjang	Persentase kegiatan penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan	100,00%	1.000.000.000	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Kota Padang Panjang	Persentase kegiatan penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan	100,00%	2.100.000.000,00	1.100.000.000,00		
5.01.03.2.01.0007	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	1.000.000.000	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	1.500.000.000,00	500.000.000,00		
5.01.03.2.01.0009	Analisis Perencanaan dan	Kota Padang Panjang	Jumlah laporan hasil analisis	1 Laporan	0	Analisis Perencanaan dan Penyaluran	Kota Padang Panjang	Jumlah laporan hasil analisis	1 Laporan	600.000.000,00	600.000.000,00		

	Penyaluran Bantuan Keuangan		Perencanaan dan Penyaluran bantuan keuangan			Bantuan Keuangan		Perencanaan dan Penyaluran bantuan keuangan					
5.01.03.2.01 .0008	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Kota Padang Panjang	Penyajian Laporan Barang Milik Daerah secara akurat dan Tepat waktu	Tepat Waktu	471.337.800	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Penyajian Laporan Barang Milik Daerah secara akurat dan tepat waktu		Tepat Waktu -	317.781.100	- 153.556.700		
5.01.03.2.02	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kota Padang Panjang	Persentase ketepatan waktu pelaporan penyajian data BMD tepat waktu	100%	471.337.800	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase ketepatan waktu pelaporan penyajian data BMD tepat waktu		100 Persen	317.781.100	- 153.556.700		

5.01.03.2.02 .0008	Penyusunan Standar Harga	Kota Padang Panjang	Jumlah Dokumen Standar Harga yang Disusun	2 Dokumen	27.803.000	Penyusunan Standar Harga	Kota Padang Panjang	Jumlah Standar Harga yang Disusun	2 Dokume n	6.531.80 0	- 21.271.200		
5.01.03.2.02 .0009	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kota Padang Panjang	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	16.635.000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kota Padang Panjang	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokume n	6.578.00 0	- 10.057.000		
5.01.03.2.03 .00010	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Penatausahaa n Barang Milik Daerah	2 Laporan	112.107.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Penatausaha an Barang Milik Daerah	2 Laporan	41.504.2 00	- 70.602.800		
5.01.03.2.03 .00011	Pengamanan Barang Milik Daerah	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	3 laporan	93.670.000	Pengamanan Barang Milik Daerah	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Hasil Pengamana n Barang Milik Daerah	1 Laporan	43.100.0 00	- 50.570.000		

5.01.03.2.03 .00012	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Kota Padang Panjang	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtang anan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	4 Dokumen	203.843.000	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtangan an, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Kota Padang Panjang	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaata n, Pemindahta nganan, Pemusnahan , dan Penghapusa n Barang Milik Daerah	4 Dokume n	213.571. 200	9.728.200		
5.01.03.2.03 .00013	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	2 laporan	17.279.800	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan	2 Laporan	6.495.90 0	- 10.783.900		

								Barang Milik Daerah					
5.05.02.2.01	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Kota Padang Panjang	Persentase Peningkatan Pajak daerah dan Retribusi daerah	2%	600.578.100	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Peningkatan Pajak daerah dan Retribusi daerah		2 Persen	778.714.899	178.136.799		
5.05.02.2.01.0002	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kota Padang Panjang	Jumlah Pencapaian Pendapatan Daerah dari Pajak Daerah	9,9 Milyar	600.578.100	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Pencapaian Pendapatan Daerah dari Pajak Daerah		9,9	778.714.899	178.136.799		
									Milyar				
5.05.02.2.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Kota Padang Panjang	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan	9	168.639.300	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Kota Padang Panjang	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan	9	341.607.999	172.968.699		
				dokumen					Dokumen				

			Kebijakan Pajak Daerah					Pajak Daerah					
5.05.02.2.02 .0003	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	2 Laporan	240.970.000	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	2 Laporan	266.495.000	25.525.000		
5.05.02.2.03	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Kota Padang Panjang	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	400 Obyek pajak	89.261.900	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah	Kota Padang Panjang	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	400 Obyek Pajak	75.931.900	- 13.330.000		

						dan Bangunan (BPHTB)							
5.05.02.2.03 .0002	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Kota Padang Panjang	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	72 Dokumen	101.706.900	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Kota Padang Panjang	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	72 Dokumen	94.680.00	-7.026.900		

No	Rancangan Perubahan RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan (sesuaikan dengan PI)						SELISH	Catatan Penting
	(Renstra 2025-2029)												
	Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi Pelaksanaa n Kegiatan	Indikator kinerja	Target capaia n	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Subkegiata n	Indikator Kinerja	Lokasi Pelaksanaan	Target capaian	Kebutuhan Dana			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13=11-6	12	
	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH				12.055.271.358					12.055.271.358			
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				12.055.271.358					12.055.271.358			
	Keuangan				12.055.271.358					12.055.271.358			
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Padang Panjang	Persentase pemenuhan urusan penunjang pada Badan Pengelola Keuangan Daerah	100,00 %	8.129.301.859	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Padang Panjang	Persentase pemenuhan urusan penunjang pada Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah	100,00%	8.129.301.859			
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Padang Panjang	Persentase pemenuhan layanan adminstrasi keuangan perangkat daerah	100%	6.911.924.813	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan adminstrasi keuangan perangkat daerah		100 Persen	6.911.924.813			

X.XX. 01.2.0 2.000 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Padang Panjang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	630 Orang/bulan	6.911.924.813	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Padang Panjang	630 Orang/bulan	6.911.924.813		
X.XX. 01.2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Padang Panjang	Persentase pemenuhan layanan adminstrasi kepegawaian perangkat daerah	100%	259.937.846	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan adminstrasi umum perangkat daerah		91 Persen	259.937.846		
X.XX. 01.2.0 6.000 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Padang Panjang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket	8.813.400	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Padang Panjang	7 Paket	8.813.400		
X.XX. 01.2.0 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Padang Panjang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	45 Paket	73.835.746	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Padang Panjang	45 Paket	73.835.746		
X.XX. 01.2.0 6.000 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Padang Panjang	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	15.653.700	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Padang Panjang	2 Paket	15.653.700		
X.XX. 01.2.0 6.000 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	462 Laporan	161.635.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Padang Panjang	256 Laporan	161.635.000	-	

X.XX. 01.2.0 6.000 5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Padang Panjang	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	100%	100.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan		100 Persen	100.000.000		
X.XX. 01.2.0 6.000 9	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Padang Panjang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit	10.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Padang Panjang	7 Unit	10.000.000		
X.XX. 01.2.0 6.000 9	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Padang Panjang	Jumlah unit kendaraan dinas yang disediakan	1 Unit	90.000.000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas yang disediakan	Kota Padang Panjang	1 Unit	90.000.000		
X.XX. 01.2.0 7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Padang Panjang	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100%	645.494.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi		100 Persen	645.494.000		
X.XX. 01.2.0 7.000 2	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3 Laporan	3.603.700	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Padang Panjang	3 Laporan	3.603.700		

X.XX. 01.2.0 7.000 5	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 laporan	133.989.500	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Padang Panjang	60 Laporan	133.989.500	-	
X.XX. 01.2.0 7.000 6	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	507.900.800	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Padang Panjang	2 Laporan	507.900.800		
X.XX. 01.2.0 8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Padang Panjang	Persentase ketersediaan barang milik daerah berkondisi baik	100%	211.945.200	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan barang milik daerah berkondisi baik		90 Persen	211.945.200		
X.XX. 01.2.0 8.000 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Padang Panjang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	33 Unit	136.540.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Padang Panjang	23 Unit	136.540.000		

X.XX. 01.2.0 8.000 2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Padang Panjang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	56 Unit	40.770.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Padang Panjang	56 Unit	40.770.000		
X.XX. 01.2.0 8.000 4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Padang Panjang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dire habilitasi	1 Unit	34.635.200	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi	Kota Padang Panjang	1 Unit	34.635.200		
X.XX. 01.2.0 9	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Kota Padang Panjang	Penyusunan Produk anggaran yang tertib efisien dan tepat waktu	Tepat Waktu	2.829.473.500	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Penyusunan Produk anggaran yang tertib efisien dan tepat waktu		Tepat Waktu	2.829.473.500		
			Penyusunan Produk anggaran yang tertib efisien dan tepat waktu	Tepat Waktu			Penyusunan Produk anggaran yang tertib efisien dan tepat waktu		Tepat Waktu	2.829.473.500		
			Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD	47%			Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD		47%			
			Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	30%			Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik		30%			

			Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	20%			Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar		20%			
			Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu	100%			Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu		100%			
X.XX.01.2.09	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Kota Padang Panjang	Penyusunan APBD/ APBDP berdasarkan ketentuan baik secara tanggal/ waktu maupun ketentuan lainnya	Tepat Waktu	684.284.600	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Penyusunan APBD/ APBDP berdasarkan ketentuan baik secara tanggal/ waktu maupun ketentuan lainnya		Tepat Waktu	684.284.600		
X.XX.01.2.09.001.1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Kota Padang Panjang	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	115.739.400	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Kota Padang Panjang	2 Dokumen	115.739.400		
5.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Kota Padang Panjang	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	116.192.400	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Kota Padang Panjang	2 Dokumen	116.192.400		

5.01.0 2.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Kota Padang Panjang	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	6 dokume n	333.618.400	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Kota Padang Panjang	6 Dokume n	333.618.400		
5.01.0 2.2.01 .0002	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Kota Padang Panjang	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	4 Dokume n	118.734.400	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Kota Padang Panjang	4 Dokume n	118.734.400		
5.01.0 2.2.01 .0005	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Kota Padang Panjang	Realisasi pencairan anggaran tepat waktu sesuai RAK	88%	11.872.000	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Kota Padang Panjang	Realisasi pencairan anggaran tepat waktu sesuai RAK	88%	11.872.000		

5.01.0 2.2.01 .0002	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Kota Padang Panjang	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	6 Dokum en	11.872.000	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Kota Padang Panjang	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	6 Dokume n	11.872.000		
5.01.0 2.2.02 .0001	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Tepat Waktu	33.316.900	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Tepat Waktu	33.316.900		
5.01.0 2.2.03	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	4 Lapora n	3.196.000	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	8 Laporan	3.196.000		

5.01.0 2.2.03 .0003	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	7 Laporan	24.157.900	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	7 Laporan	24.157.900		
5.01.0 2.2.04	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Kota Padang Panjang	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 Dokumen	5.963.000	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Kota Padang Panjang	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 Dokumen	5.963.000		
5.01.0 3	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Kota Padang Panjang	Persentase kegiatan penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan	100,00 %	2.100.000.000,00	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Kota Padang Panjang	Persentase kegiatan penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan	100,00%	2.100.000.000,00		

5.01.0 3.2.01 .0007	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	1.500.000.000,00	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	1.500.000.000,00		
5.01.0 3.2.01 .0009	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Kota Padang Panjang	Jumlah laporan hasil analisis Perencanaan dan Penyaluran bantuan keuangan	1 Laporan	600.000.000,00	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Kota Padang Panjang	Jumlah laporan hasil analisis Perencanaan dan Penyaluran bantuan keuangan	1 Laporan	600.000.000,00		
5.01.0 3.2.01 .0008	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Kota Padang Panjang	Penyajian Laporan Barang Milik Daerah secara akurat dan Tepat waktu	Tepat Waktu	317.781.100	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Penyajian Laporan Barang Milik Daerah secara akurat dan tepat waktu		Tepat Waktu -	317.781.100		
			Persentase Penambahan nilai aset tetap	10%			Persentase Penambahan nilai aset tetap		10%			

5.01.0 3.2.02	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kota Padang Panjang	Persentase ketepatan waktu pelaporan penyajian data BMD tepat waktu	100%	317.781.100	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase ketepatan waktu pelaporan penyajian data BMD tepat waktu		100 Persen	317.781.100		
5.01.0 3.2.02 .0008	Penyusunan Standar Harga	Kota Padang Panjang	Jumlah Dokumen Standar Harga yang Disusun	2 Dokumen	6.531.800	Penyusunan Standar Harga	Kota Padang Panjang	Jumlah Standar Harga yang Disusun	2 Dokumen	6.531.800		
5.01.0 3.2.02 .0009	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kota Padang Panjang	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	6.578.000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kota Padang Panjang	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	6.578.000		
5.01.0 3.2.03 .0001 0	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	2 Laporan	41.504.200	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	2 Laporan	41.504.200		
5.01.0 3.2.03 .0001 1	Pengamanan Barang Milik Daerah	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	3 laporan	43.100.000	Pengamanan Barang Milik Daerah	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1 Laporan	43.100.000		

5.01.0 3.2.03 .0001 2	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Kota Padang Panjang	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	4 Dokumen	213.571.200	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Kota Padang Panjang	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	4 Dokumen	213.571.200		
5.01.0 3.2.03 .0001 3	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	2 laporan	6.495.900	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	2 Laporan	6.495.900		
5.05.0 2.2.01	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Kota Padang Panjang	Persentase Peningkatan Pajak daerah dan Retribusi daerah	2%	778.714.899	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Peningkatan Pajak daerah dan Retribusi daerah		2 Persen	778.714.899		
			Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	16,28%			Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah		16,28%			

			Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan	14 OPD			Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan		14 OPD			
			Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital	100%			Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital		100%			
5.05.0 2.2.01 .0002	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kota Padang Panjang	Jumlah Pencapaian Pendapatan Daerah dari Pajak Daerah	9,9 Milyar	778.714.899	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Pencapaian Pendapatan Daerah dari Pajak Daerah		9,9 Milyar	778.714.899		
5.05.0 2.2.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Kota Padang Panjang	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	9 Dokumen	341.607.999	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Kota Padang Panjang	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	9 Dokumen	341.607.999		

5.05.0 2.2.02 .0003	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	2 Laporan	266.495.000	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	2 Laporan	266.495.000		
5.05.0 2.2.03	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Kota Padang Panjang	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	400 Obyek pajak	75.931.900	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Kota Padang Panjang	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	400 Obyek Pajak	75.931.900		
5.05.0 2.2.03 .0002	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Kota Padang Panjang	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	72 Dokumen	94.680.000	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Kota Padang Panjang	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	72 Dokumen	94.680.000		

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pada Badan Pengelola Keuangan Daerah tidak ada Usulan terhadap Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pada Tahun 2025 ini kita kita **Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045**" Tema ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk memulai transformasi besar sebagai fondasi menuju 100 tahun kemerdekaan Indonesia RPJMN 2025–2029 merupakan tahap awal pelaksanaan RPJPN 2025–2045. Terdapat **8 prioritas nasional** yang menjadi arah utama pembangunan:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan HAM
2. Memantapkan pertahanan dan kemandirian bangsa (termasuk swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, digital, hijau, dan biru)
3. Melanjutkan pembangunan infrastruktur & penciptaan lapangan kerja
4. Penguatan SDM dan sains-teknologi (termasuk pendidikan, kesehatan, gender, pemuda, dan disabilitas)
5. Hilirisasi industri berbasis sumber daya alam
6. Pembangunan dari desa dan bawah (untuk pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan)
7. Reformasi politik, hukum, dan birokrasi (termasuk pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan)
8. Harmoni sosial dan lingkungan hidup (termasuk toleransi antarumat beragama dan pelestarian budaya)

Dalam rangka mendukung Tema Pembangunan Nasional serta Major Project dalam RKP Tahun 2024 serta arah kebijakan dan prioritas pembangunan Kementerian Keuangan maka kebijakan dan langkah strategis Badan Pengelola Keuangan Daerah Pada Rencana Kerja Perubahan 2025 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Pengelolaan Keuangan daerah;
2. Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan PAD;
3. Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Bidang Keuangan Daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Badan Pengelola Keuangan Daerah

Dalam rangka pencapaian target kerja untuk lima tahun ke depan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang perlu menetapkan tujuan sebagai langkah awal pelaksanaan tugas.

TUJUAN

Yang Menjadi tujuan kedepan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah adalah ***“Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan, aset daerah dan Pendapatan asli daerah “***

Untuk mendukung Tujuan Badan Pengelola Keuangan Daerah ada beberapa indikator agar Tujuan yang diemban Badan Pengelola Keuangan Daerah Tahun 2025 – 2029 dapat tercapai yaitu :

1. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB
2. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah
3. Indeks Pengelolaan Aset Daerah
4. Nilai Pendapatan Asli daerah

SASARAN

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan tersebut, maka sasaran yang akan dicapai oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah 5 tahun kedepan yaitu :

1. Meningkatnya kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah dengan indikator nya Opini BPK
2. Meningkatnya Pengelolaan Aset Daerah dengan Indikator Persentase Peningkatan Pengelolaan Aset OPD
3. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dengan indikator persentase masyarakat Dalam melaksanakan kewajiban membayar Pajak daerah dan retribusi daerah
4. Meningkatnya kinerja perangkat daerah dengan indikator Nilai AKIP Badan Pengelola Keuangan Daerah

3.3 Program Dan Kegiatan Renja Badan Pengelola Keuangan daerah

Beberapa faktor yang menjadi pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang Pada Perubahan Renja Tahun 2025 antara lain adalah :

1. Penetapan tujuan dan sasaran strategis yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029.
2. Penetapan Renstra Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029
3. Evaluasi Pelaksanaan RPJMD tahun kelima, serta Renja BPKD sampai dengan Tahun 2023.
4. Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan fungsi dan kewenangan Bappeda.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Badan Pengelola Keuangan Daerah Masih terdiri dari 4 Program yaitu Program Pengelolaan Keuangan Daerah, Program Pengelolaan Pendapatan Daerah, Program Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Program Pelayan Administrasi Perkantoran dan 12 Kegiatan namun sebelum Perubahan pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Memiliki 32 Sub kegiatan guna mendukung seluruh sasaran Maupun Tujuan yang telah ditetapkan pada Renstra Badan Pengelola Keuangan Daerah tahun 2025 – 2029 Pada Tahun 2025 sub kegiatan Penyusunan Petunjuk teknis administrasi keuangan tidak dilaksanakan karena Sub Kegiatan telah selesai 100% namun pada Tahun 2025 ini ada satu sub kegiatan yang muncul yaitu Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas/ Jabatan . Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat rincian Program, kegiatan maupun sub kegiatan serta Target perubahan yang akan di capai pada Perubahan Tahun 2025 pada Tabel 3.1 dibawah ini :

Tabel 3.1
Tujuan, Sasaran dan Indikator Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kota Padang Panjang Tahun 2025

Badan Pengelola Keuangan Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Renstra 2025	P-Renja 2025
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan, aset daerah dan Pendapatan asli daerah				
		Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Opini BPK		
		Meningkatnya Pengelolaan Aset daerah	Persentase Pengelolaan aset OPD		
		Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	persentase masyarakat Dalam melaksanakan kewajiban membayar Pajak daerah dan retribusi daerah		

		Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai Akip Badan Pengelola Keuangan Daerah		
--	--	---------------------------------------	--	--	--

Berdasarkan Tabel TC.31 diatas dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya hampir seluruh Sub Kegiatan yang ada pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang yang mengalami Penurunan anggaran hal ini disebabkan oleh Refocusing yang dilakukan atas Inpres Nomor 5 Tahun 2025 tentang Efisiensi anggaran bahkan jika kita lihat secara total pagu Pengurangan yang dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah lebih dari 1 Milyar tetapi hal ini tidak mempengaruhi terhadap pencapaian Tujuan maupun sasaran yang telah ditargetkan pada awal Tahun 2025

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Kota Padang Panjang Tahun 2025 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada Perubahan 2025 yang telah dirumuskan. Dalam merumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

1. Mempedomani Perubahan RKPD Kota Kota Padang Panjang Tahun 2025 serta Review Renstra Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2018 - 2023;
2. Mendukung pencapaian Tujuan dan sasaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025 - 2029, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Kota Padang Panjang pada Perubahan Tahun 2025 Secara umum Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota padang Panjang bertugas menkoordinasikan pencapaian 2 (dua) indikator tujuan yaitu : “Indeks Pengelola Keuangan Daerah dan Opini BPK ;
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan baik perencanaan pembangunan perekonomian, pemerintahan dan pembangunan manusia, penelitian pengembangan inovasi dan pengendalian daerah, serta infrastruktur pengembangan wilayah dalam kerangka pembangunan daerah Kota Padang Panjang;
4. Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang
6. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program /kegiatan/sub kegiatan;
7. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan

program /kegiatan/sub kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku.

8. Secara rinci rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Rencana Kerja Perubahan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025 sebagaimana terlampir pada table 3.2 berikut :

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH							15.118.573.922	11.865.797.233	12.055.271.358					
	5.	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							15.118.573.922	11.865.797.233	12.055.271.358					
	5.02.	KEUANGAN							15.118.573.922	11.865.797.233	12.055.271.358					
132	5.02.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Badan Pengelola Keuangan Daerah	100 %	100 %		100 %	100 %	8.778.653.922	8.902.273.033	8.129.301.859					
	5.02.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %		100 %	100 %	100 %	6.384.166.322	6.790.845.581	6.911.924.813			-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	-

	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	3780 Orang/bulan		630 Orang/bulan	644 Orang/bulan	630 Orang/bulan	6.384.166.322	6.790.845.581	6.911.924.813	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	
	5.02.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah	100 %		100 %	91 %	100 %	446.824.400	509.008.552	259.937.846			-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	-
	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	42 Paket		7 Paket	7 Paket	7 Paket	15.494.500	15.488.000	8.813.400	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	
	5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	54 Paket		9 Paket	9 Paket	9 Paket	116.752.400	145.156.552	73.835.746	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	48 Paket		8 Paket	8 Paket	8 Paket	14.577.500	23.728.000	15.653.700	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten	

															Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	
	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2360 Laporan		462 Laporan	462 Laporan	256 Laporan	300.000.000	324.636.000	161.635.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	
	5.02.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	100 %		100 %	100 %	100 %	415.760.000	152.713.100	100.000.000			-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	-
	5.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	8 Unit		0 Unit	1 Unit	1 Unit	352.180.000	90.000.000	90.000.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	
	5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	52 Unit		12 Unit	6 Unit	4 Unit	63.580.000	62.713.100	10.000.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	

	5.02.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100 %		100 %	100 %	100 %	935.400.000	692.445.400	645.494.000			-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	-
	5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	18 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	4.400.000	4.379.000	3.603.700	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	
	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	360 Laporan		60 Laporan	60 Laporan	60 Laporan	163.000.000	163.000.000	133.989.500	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	
	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	768.000.000	525.066.400	507.900.800	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	
	5.02.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan barang milik daerah berkondisi baik	100 %		100 %	90 %	100 %	298.251.600	378.630.200	211.945.200			-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten	-

																Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	
	5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	33 Unit		23 Unit	34 Unit	23 Unit	205.691.600	242.629.000	136.540.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		
	5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	336 Unit		56 Unit	56 Unit	56 Unit	43.580.000	43.490.000	40.770.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		
	5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit		1 Unit	1 Unit	1 Unit	48.980.000	92.511.200	34.635.200	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		
133	5.02.02.	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD	30%		47,3%		47%	4.972.908.750	1.891.608.300	2.829.473.500						
			Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	40%		28%		30%									

			Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	20%		20%		20%								
			Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu	100%		100%		100%								
	5.02.02.2.01.	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Penyusunan APBD APBDP berdasarkan ketentuan baik secara tanggal/waktu maupun ketentuan lainnya	Tepat Waktu		Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	716.483.800	716.323.500	684.284.600			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	seluruh OPD dilingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang
	5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	12 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	118.339.400	118.290.400	115.739.400	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	
	5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	12 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	119.912.400	119.863.400	116.192.400	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	
	5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	36 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	349.176.000	349.154.500	333.618.400	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	

															Adaptif dan Kolaboratif	
	5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	24 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	129.056.000	129.015.200	118.734.400	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	
	5.02.02.2.02.	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Realisasi pencairan anggaran tepat waktu sesuai RAK	82 %		82 %	84 %	83 %	61.948.000	61.830.000	11.872.000			-	-	seluruh OPD dilingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang
	5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	36 Dokumen		2 Dokumen	9 Dokumen	6 Dokumen	61.948.000	61.830.000	11.872.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	
	5.02.02.2.03.	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Penyusunan Laporan Keuangan Daerah yang tepat waktu sesuai dan SAP	Tepat Waktu		Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	113.457.300	113.454.800	33.316.900			-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	null
	5.02.02.2.03.0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	48 Laporan		8 Laporan	8 Laporan	8 Laporan	6.556.200	6.553.400	3.196.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	

	5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	42 Laporan		7 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	93.104.100	93.104.400	24.157.900	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	
	5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	12 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	13.797.000	13.797.000	5.963.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	
	5.02.02.2.04.	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase kegiatan penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan	100 %		100 %	100 %	100 %	4.081.019.650	1.000.000.000	2.100.000.000			-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	-
	5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	5 Laporan		0 Laporan	-	1 Laporan	-	-	600.000.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	
	5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	4 Dokumen		1 Dokumen	1 Laporan	0 Dokumen	4.081.019.650	1.000.000.000	1.500.000.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten	

															Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	
134	5.02.03.	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	10 %		4% %		10 %	810.170.000	471.337.800	317.781.100					
	5.02.03.2.01.	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase ketepatan waktu pelaporan penyajian data BMD tepat waktu	100 %		100 %	100 %	100 %	810.170.000	471.337.800	317.781.100			-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	null
	5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	12 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	114.626.000	27.803.000	6.531.800	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	
	5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	12 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	16.635.000	16.635.000	6.578.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	

	5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	12 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	151.849.000	112.107.000	41.504.200	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	
	5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	18 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	290.930.000	93.670.000	43.100.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	
	5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	24 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	218.850.000	203.843.000	213.571.200	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	
	5.02.03.2.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	12 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	17.280.000	17.279.800	6.495.900	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	
135	5.02.04.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	31,81 %		16.18 %	2 %	16,28 %	556.841.250	600.578.100	778.714.899					
			Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan	14 OPD		14 OPD		14 OPD								

			Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital	100 %		100 %		100 %								
	5.02.04.2.01.	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Pencapaian Pendapatan Asli Daerah	947,3 Rupiah		9,6 Rupiah	10,1 Miliar	112,7 Rupiah	556.841.250	600.578.100	778.714.899			-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	-
	5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	54 Dokumen		9 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	168.646.500	168.639.300	341.607.999	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	
	5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	241.000.000	240.970.000	266.495.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	
	5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	10338 Obyek Pajak		14000 Obyek Pajak	400 Obyek Pajak	400 Obyek Pajak	97.194.750	89.261.900	75.931.900	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	

	5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	432 Dokumen		72 Dokumen	72 Dokumen	72 Dokumen	50.000.000	101.706.900	94.680.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	
--	-------------------	---	---	-------------	--	------------	------------	------------	------------	-------------	------------	--	------------------------------	---	---	--

BAB IV

PENUTUP

Terkait dengan penyiapan dan penyediaan dokumen pengelolaan keuangan ditingkat OPD, Badan Pengelola Keuangan Daerah telah menyusun dan menetapkan Renstra Badan Pengelola Keuangan Daerah (Renstra BPKD) Tahun 2025 - 2029 yang memuat Tujuan, sasaran, kebijakan dan program pembangunan yang akan dilaksanakan selama 5 tahun kedepan sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi BPKD. Kemudian terkait dengan perencanaan tahunan daerah maka seluruh OPD perlu menyusun dan menetapkan Rencana Kerja (Renja) masing masing.

Sehubungan dengan ini maka BPKD juga menyusun dan menetapkan Rancangan akhir Perubahan Renja BPKD tahun 2025. Rancangan Perubahan Renja BPKD ini disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun berkenaan sampai dengan Triwulan I, permasalahan dan rumusan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pengguna anggaran dan pejabat pelaksana teknis kegiatan pada tahun yang akan datang.

Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renja BPKD ini sangat tergantung pada peran aktif seluruh jajaran pimpinan dan staf BPKD. Untuk itu diperlukan sikap mental, tekad, semangat, dan kekuatan serta disiplin semua unsur BPKD, dengan cara memberi dukungan penuh terhadap pelaksanaan program serta kegiatan sesuai dengan fungsi dan kemampuan masing-masing.

Disamping itu, keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renja BPKD juga sangat tergantung kepada keseriusan segenap unsur BPKD dalam menyiapkan peraturan-peraturan yang akan menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan program dan kegiatan serta dalam penataan pengelolaan program dan kegiatan tersebut selama satu tahun yang akan datang

SIPD-FI : dibelak pada 2025-05-19 08:33:54

Baik dari segi tata kelola sumber daya manusia, tata kelola anggaran yang telah dialokasikan maupun tata kelola peralatan/perlengkapan. Diharapkan pada Tahun berjalan di 2025, seluruh kebutuhan pelaksanaan program/kegiatan tersebut sudah dapat diselesaikan.

Demikian Perubahan Renja BPKD Kota Padang Panjang Tahun 2025 disusun, semoga mampu meningkatkan kinerja BPKD dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun berjalan.

Padang Panjang, 30 Juni 2025



KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Dr. WINARNO, SE, ME

NIP. 19740206 199903 1 003



PEMERINTAH
KOTA PADANG PANJANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG (RENJA) TAHUN 2025

(BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAERAH)

DAFTAR ISI

Bab I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	4
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	6
Bab II. HASIL EVALUASI RENJA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DEARAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025.....	8
2.1 Evaluasi Rencana Kerja BPKD Sampai dengan Triwulan I Tahun 2025	8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan BPKD	16
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPKD	18
2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD	23
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	38
Bab III. TUJUAN DAN SASARAN BPKD	60
3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional	60
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja BPKD	61
3.3 Program dan Kegiatan Renja BPKD	61
Bab IV. PENUTUP	87

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	9
Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan BPKD	17
Tabel 2.3 Kelemahan, Kekuatan, Peluang dan Ancaman	19
Tabel 2.4 Pemetaan Permasalahan	21
Tabel 2.5 Isu-isu Strategis Pembanguna Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026 ...	22
Tabel 2.6 Review Terhadap Perubahan RKPD Tahun 2025 dengan Renja Perubahan BPKD Tahun 2025	24
Tabel 3.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024	63
Tabel 3.2 Perubahan Rencana Kerja BPKD Tahun 2024	67